

## ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

Mugiati<sup>1</sup>, Muhammad Amin Wadjo<sup>2</sup>, Muhammad Irfan Aditama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Indonesia

Email: [mugiatiustj@gmail.com](mailto:mugiatiustj@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh penyusunan anggaran, proses pengeluaran anggaran, penyusunan anggaran, dan pengawasan anggaran terhadap Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dan Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara Parsial Faktor Anggaran (X1), Proses Pengeluaran Anggaran (X2), dan Penggunaan Anggaran (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, sedangkan Pengendalian Anggaran (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Secara Simultan Faktor Anggaran (X1), Proses Pengeluaran Anggaran (X2), Penggunaan Anggaran (X3), dan Pengendalian Anggaran (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo diantara keempat variabel diatas adalah Faktor Anggaran.

Kata Kunci: Penganggaran, Pengeluaran Anggaran, Penggunaan Anggaran, Pengendalian Anggaran, Kinerja

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the influence of budget preparation, budget expenditure process, budget preparation, and budget supervision on the Financial Performance of the Yahukimo Regency Education Office and to examine and analyze the factors that have the most dominant influence on the performance of the Yahukimo Regency Education Office. The data collection methods used were observation, interviews and questionnaires. Data were analyzed descriptively and quantitatively using Multiple Linear Regression Analysis. The number of samples in this study was 78 respondents. The results of the study indicate that: Partially, Budget Factors (X1), Budget Expenditure Process (X2), and Budget Use (X3) have an effect on the Performance of the Yahukimo Regency Education Office, while Budget Control (X4) does not have a significant effect on the Performance of the Yahukimo Regency Education Office. Simultaneously, Budget Factors (X1), Budget Expenditure Process (X2), Budget Use (X3), and Budget Control (X4) have a significant effect on the Performance of the Yahukimo Regency Education Office. The variable that has the most dominant influence on the Performance of the Yahukimo Regency Education Office among the four variables above is the Budget Factor.*

*Keywords: Budgeting, Spending budget, Use of Budget, Budget Control, Performance*

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Munandar (1999) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengeluaran keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Anggaran belanja rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di daerah.

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jaya (1999: 11) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengeloaan dan pengeluaran keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini pengeloaan dan pengeluaran keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang akan dijalankan pada masa yang akan datang.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Mardiasmo (1999:11) menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sistem pengeloaan keuangan pada Dinas pendidikan kabupaten Yahukimo ini sangat luas maka dalam penelitian ini dibatasi pada pengeluaran khusus pada analisis sistem pengelolaan Keuangan Rutin Dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo serta penerapan system pengawasan pengelolaan keuangan dengan tidak mengurangi obyek penelitian yang lainnya.

## KAJIAN TEORI

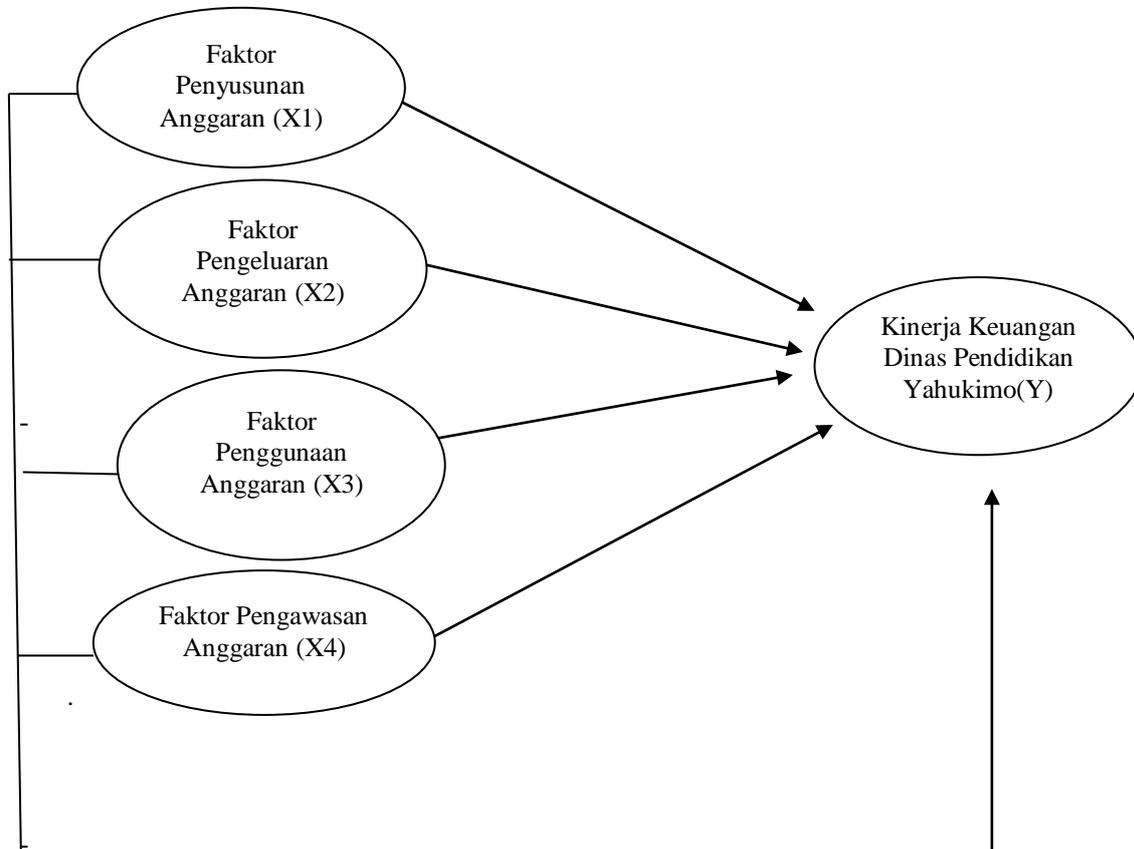
Sebelum menguraikan sistem pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai pengertian sistem itu sendiri. Adapun pengertian sistem menurut W. Gerald Cole adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (lihat Baridwan, 1991).

Munandar (1999) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Jaya (1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

## METODE PENELITIAN

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Hipotesis

1. Faktor penyusunan anggaran, proses pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
2. Faktor penyusunan anggaran, proses pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
3. Proses penyusunan anggaran merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo.

### Populasi dan Sampel

Sugiyono (2000:68), menyatakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo yaitu sebanyak 78 orang pegawai.

Dalam pengambilan sampel maka penelitian ini berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto Suharsini (1991), apabila subyeknya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya diambil semuanya sesuai dengan pendapat diatas, maka penulis mengambil seluruh populasi sebanyak 78 responden sebagai sampel.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (*Multiple regression analysis*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi**

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	T hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	27.202			
Penyusunan anggaran (X <sub>1</sub> )	0.440	2.627	0.014	Signifikan
Pengeluaran anggaran (X <sub>2</sub> )	0.585	2.308	0.029	Signifikan
Penggunaan anggaran (X <sub>3</sub> )	0.309	2.283	0.030	Signifikan
Pengawasan (X <sub>4</sub> )	0.807	2.387	0.024	Signifikan
R	= 0.800			
R Square	= 0.641			
F hitung	= 9.989			
F tabel	= 2.493			
Sign. F	= 0.000			
$\alpha$	= 0.05			

Sumber data : Data primer yang diolah

Keterangan :

- Jumlah data (observasi) = 78
- Dependen Variabel Y (Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo)
- \* signifikan pada level 5 %

Variabel dependen pada regresi ini adalah Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (Y), sedangkan variabel independennya adalah penyusunan anggaran (X<sub>1</sub>), pengeluaran anggaran (X<sub>2</sub>), penggunaan anggaran (X<sub>3</sub>), dan pengawasan (X<sub>4</sub>), dan Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$Y = 27.202 + 0.440X_1 + 0.585X_2 + 0.309X_3 + 0.440X_4 + e$$

Persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa angka yang signifikan pada variabel penyusunan anggaran (X<sub>1</sub>), pengeluaran anggaran (X<sub>2</sub>), penggunaan anggaran (X<sub>3</sub>), dan pengawasan anggaran (X<sub>4</sub>) .Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai konstan sebesar 27,202 ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada Variabel penyusunan anggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan ( $X_1, X_2, X_3,$  dan  $X_4= 0$ ), maka kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo sebesar 27.202. Dalam arti bahwa variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo meningkat sebesar 27.202 sebelum atau tanpa adanya variabel penyusunan anggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran ( $X_1, X_2, X_3,$  dan  $X_4= 0$ ).

Nilai parameter atau koefisien regresi  $b_1$  sebesar 0,440 ini menunjukkan bahwa setiap variabel perencanaan anggaran meningkat 1 kali, maka variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo akan meningkat sebesar 0.440 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dibutuhkan variabel penyusunan anggaran sebesar 0.440, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap  $X_2, X_3,$  dan  $X_4= 0$ ) atau ceteris paribus.

Nilai parameter atau koefisien regresi  $b_2$  sebesar 0,585 ini menunjukkan bahwa setiap variabel pengeluaran anggaran meningkat 1 kali, maka variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo akan meningkat sebesar 0.585 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dibutuhkan variabel pengeluaran anggaran sebesar 0.585, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap  $X_1, X_3,$  dan  $X_4= 0$ ) atau ceteris paribus.

Nilai parameter atau koefisien regresi  $b_3$  sebesar 0.309 ini menunjukkan bahwa setiap variabel penggunaan anggaran meningkat 1 kali, maka variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo akan meningkat sebesar 0.309 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dibutuhkan variabel penggunaan anggaran sebesar 0.309, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap  $X_1, X_2, X_4 = 0$ ) atau ceteris paribus.

Nilai parameter atau koefisien regresi  $b_4$  sebesar 0.002 ini menunjukkan bahwa setiap variabel pengawasan anggaran meningkat 1 kali, maka variabel Keberhasilan pembangunan akan meningkat sebesar 0.002 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan variabel Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dibutuhkan variabel pengawasan anggaran sebesar 0.002, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap  $X_1, X_2, X_3, = 0$ ) atau ceteris paribus.

### **Pengujian Hipotesis Secara Simultan ( Uji F)**

Pada pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel penyusunan anggaran ( $X_1$ ), pengeluaran anggaran ( $X_2$ ), penggunaan anggaran ( $X_3$ ), dan pengawasan anggaran ( $X_4$ ), berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Agar dapat mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji F. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji F dan besarnya  $F_{tabel}$  dengan *degree of freedom* ( $df$ ) 5%.

**Tabel 2. Pengujian Hipotesis (Simultan)**

	Hipotesis Alternatif (Ha)	Nilai	Status
1 <sub>1</sub>	Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Variabel penyusunan anggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran dan sosial budaya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo	F =9.989 Sig F =0.000 F <sub>tabel</sub> =2.493	Ha tidak ditolak / Ho ditolak

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa variabel penyusunan anggaran (X1), pengeluaran anggaran (X2), penggunaan anggaran (X3), dan pengawasan anggaran (X4) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Pada pengujian ini Ha tidak ditolak dengan ditunjukkan dengan besarnya  $F_{hitung}$  sebesar 9.989. Nilai ini lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $9.989 > 2.493$ ).

Hal ini menunjukkan bahwa keempat variable secara keseluruhan menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Dengan demikian aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam menyiapkan rencana penyusunan anggaran satuan kerja (RASK) di masing-masing bagian yang nantinya akan dijadikan sebagai Rencana APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo sebaiknya memperhatikan kepentingan masyarakat, yang dijamin melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat dusun, desa, kecamatan dan tingkat kabupaten serta keterlibatan staf-staf mereka sebelum penyusunan anggaran. Dengan adanya penjarangan aspirasi masyarakat dan keterlibatan staf-staf dalam persiapan penyusunan anggaran, pada masing-masing bidang akan menjadi jelas tujuannya, mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dan aparat yang menyusunnya, dapat dievaluasi dalam pelaksanaannya walaupun plafon anggaran pada masing-masing bidang kerja telah ditetapkan. Jadi dengan melalui tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran tersebut membuat Dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo akan mengetahui hasil usahanya sehingga membuat mereka merasa yakin dan sukses dengan penyusunan anggaran yang dibuatnya.

Setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis statistik menunjukkan bahwa variabel penyusunan anggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran, secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di provinsi Papua, maka telaahan selanjutnya akan dilakukan analisis Deskriptif. Analisis deskriptif ini bukanlah merupakan kajian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari analisis sebelumnya yang menggunakan pendekatan statistik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apakah hasil uji hipotesis pada analisis kuantitatif (uji statistik) dapat ditunjukkan pada analisis deskriptif. Untuk memperoleh jawaban pertanyaan tersebut di atas, maka digunakan metode fenomenologi. Metode ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap partisipan (aparat dinas pendidikan kabupaten yahukimo yang berkompeten dengan anggaran) yaitu dengan wawancara intensif (agar mampu menyibak orientasi subjek atau dunia kehidupannya), memahami keadaan sosialnya, dan terakhir peneliti akan melakukan interpretasi terhadap makna yang didapat dari aktivitas tersebut

Berdasarkan hasil analisis statistik di atas ditemukan bahwa variabel penyusunan anggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di provinsi Papua

### Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( Uji t )

**Tabel 3. Pengujian Hipotesis (Partial)**

	Hipotesis Alternative (Ha)	Nilai	Status
1.	Variabel penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.	t = 2.627* Sig t = 0.014 t <sub>tabel</sub> = 2.045	H12a tidak ditolak/ H12o ditolak
2.	Variabel pengeluaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.	t = 2.308* Sig t = 0.029 t <sub>tabel</sub> = 2.045	H13a tidak ditolak / H13o ditolak
3.	Variabel penggunaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.	t = 2.283* Sig t = 0.030 t <sub>tabel</sub> = 2.045	H14a tidak ditolak / H14o ditolak
4.	Variabel pengawasan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.	t = 0.012 Sig t = 0.990 t <sub>tabel</sub> = 2.045	H15a ditolak / H15o tidak ditolak

Sumber data : Data Primer yang diolah

Untuk menunjukkan apakah variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat serta untuk membuktikan variabel manakah yang paling dominan, maka digunakan uji t dan koefisien Beta yang telah distandarisasi. Hasil dari pengujian tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 5.9 yang menunjukkan hasil uji t dan besarnya t table pada signifikansi atau taraf nyata 0,05 (derajat kepercayaan 95%) dua sisi.

Variabel penyusunan anggaran memiliki nilai tstatistik sebesar 2.627. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2.627 > 2.045). Dengan demikian pengujian menunjukkan H12a tidak ditolak atau H12o ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Variabel pengeluaran anggaran memiliki nilai tstatistik sebesar 2.308. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2.308 > 2.045). Dengan demikian pengujian menunjukkan H13a tidak ditolak atau H13o ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel pengeluaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Variabel penggunaan anggaran memiliki nilai tstatistik sebesar 2.283. Nilai ini lebih besar dari ttabel ( $2.283 > 2.045$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan H14a tidak ditolak atau  $H_0$  ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel penggunaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Variabel Pengawasan memiliki nilai tstatistik sebesar -2.387. Nilai ini lebih besar dari ttabel ( $-2.387 < -2.045$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan H16a ditolak atau H16o tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel pengawasan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Pada lampiran dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo adalah variabel penyusunan anggaran (X1) yang ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta terbesar yaitu sebesar 0.386. Hipotesis ini didukung oleh Sritua Arief (1993) yaitu : untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient) atau disebut dengan standardized coefficient

Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) di atas variabel penyusunan anggaran (X1), pengeluaran anggaran (X2), penggunaan anggaran (X3), dan pengawasan anggaran (X4) terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, secara parsial variabel penyusunan anggaran (X1), pengeluaran anggaran (X2), dan penggunaan anggaran(X3), berpengaruh namun pengawasan anggaran (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK) pada masing-masing bidang harus mengikuti sistem anggaran yg adan dengan memperhatikan 4 variabel tersebut. Dalam sistem anggaran yg diterapkan harus lebih mengutamakan upaya pencapaian hasil atau ouput dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selain itu semakin tinggi partisipasi masyarakat dan staf-staf pada masing-masing bidang ikut terlibat dalam penyusunan anggaran maka, semakin baik pula hasil penyusunan anggaran.

### **Uji Korelasi (R dan R<sup>2</sup>)**

Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis korelasi yang diperoleh dari output regresi mengorelasi pengaruh yang diwakili oleh variabel penyusunan anggaran (X1), pengeluaran anggaran (X2), penggunaan anggaran (X3), dan pengawasan anggaran (X4) terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, diperoleh nilai  $R^2 = 0.641$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai perilaku yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi adalah sebesar 64.1% sedangkan sisanya yaitu 35.9 % yang dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. Dengan kata lain bahwa 64,1% dari Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dapat dipengaruhi oleh penyusunan anggaran (X1), pengeluaran anggaran (X2), penggunaan anggaran (X3), dan pengawasan (X4). Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo tergantung dengan adanya faktor penyusunan anggaran yang baik , kemudian pengeluaran anggaran yang baik, dan penggunaan anggaran yang baik serta faktor

pengawasan anggaran, dengan demikian semakin baik anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun dibatasi oleh anggaran yang ditetapkan. R sebesar 0.800 artinya pengaruh antara variabel penyusunan anggaran (X1), pengeluaran anggaran (X2), penggunaan anggaran (X3), dan pengawasan anggaran (X5) terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo adalah cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila keempat faktor tersebut diperhatikan maka Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo akan berjalan dan berhasil dengan baik.

Dari hasil deskripsi hipotesis di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK) di masing-masing SKPD dapat memahami tentang tujuan anggaran. Artinya pemerintah Provinsi Papua secara umum dalam menyusun rencana anggaran pada setiap satuan unit kerja telah didasarkan pada tujuan anggaran yang akan dicapai. Kepmendagri No 29 Tahun 2002 menyatakan mekanisme penyusunan RASK yaitu melalui penjabaran aspirasi masyarakat berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD, Visi, Misi, tujuan pokok dan fungsi instansi dengan melibatkan staf-staf yang ada di unit kerjanya masing-masing. Dengan adanya partisipasi staf-staf dalam menyusun anggaran, maka rencana anggaran satuan kerja (RASK) yang dibuat akan menjadi lebih jelas tujuannya, mempunyai nilai manfaat atau umpan balik bagi masyarakat atau aparat yang menjalankannya mudah dievaluasi serta telah mengikuti kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan dikabupaten Yahukimo.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hasil penelitian ini secara simultan variabel penyusunan anggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara keseluruhan menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian melalui uji statistik Variabel penyusunan anggaran memiliki nilai t statistik sebesar 2.627. Nilai ini lebih besar dari t tabel ( $2.627 > 2.045$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan  $H_{12a}$  ditolak atau  $H_{12o}$  tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di provinsi Papua.

Hasil penelitian melalui uji statistik Variabel pengeluaran anggaran memiliki nilai t statistik sebesar 2.308. Nilai ini lebih besar dari t tabel ( $2.308 > 2.045$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan  $H_{13a}$  tidak ditolak atau  $H_{13o}$  ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel pengeluaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di provinsi Papua.

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel penggunaan anggaran memiliki nilai t statistik sebesar 2.283. Nilai ini lebih besar dari t tabel ( $2.283 > 2.045$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan  $H_{14a}$  ditolak atau  $H_o$  tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel penggunaan anggaran berpengaruh secara signifikan

terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Dan untuk Variabel pengawasan anggaran memiliki nilai tstatistik sebesar -2.387. Nilai ini lebih Kecil dari ttabel ( $-2.387 < -2.045$ ). Dengan demikian pengujian menunjukkan H16a ditolak atau H16o tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel pengawasan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Variabel yang paling dominan mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo adalah variabel penyusunan anggaran (X1) yang ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta terbesar yaitu sebesar 0.386. Dengan demikian Hipotesis ketiga terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA

Bana, Yahya M.,2001, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1994, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1981, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/606/PUOD tanggal 9 Pebruari 1985 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Inspektorat Jenderal Depdagri, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985 tentang Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengurusan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 tentang Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Devas,N., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly. 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (terjemahan Masri Maris), UI-Press, Jakarta.

Januarti, 1999, “Peranan Subsidi Daerah Otonom (SDO) Terhadap Pembiayaan Rutin di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas “, Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).

Jones, Bernard M., 1996, Financial Management in the Public Sector, McGRAW-HILL Publishing Company, England.

Kijakazi, Kilolo, and Wendel Primus, March 13, 1998, “ Would Using the Budget Surplus for Tax Cuts or Entitlement Expansions Affect Long- Term Social Security Solvency ?“, Centre on Budget and Policy Priorities, Washington, DC 20002, [index.htmlindex.html](http://index.htmlindex.html).

Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI ,2000 , “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik “, Exposure Draft , Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI, Jakarta.

Luo, Huaping, and Robert T.Golembiewski, 1996, “ Budget Deficits in China Calculations, Causes, and Impacts “, The Pennsylvania State University, [JXR11@PSU.EDU](mailto:JXR11@PSU.EDU).

Mahmud, Syahril, Drs., 1991, Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah Dan Keuangan Desa, PT. Karya Sriwijaya Mandiri, Jakarta.

Mamesah, D.J., 1995, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo, Makhfatih,A., Supomo,B., Purwoto,H.,2000, “Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD)”, Laporan Akhir, PAU-SE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Menteri Negara Otonomi Daerah dan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2000, Pembekalan Teknis Manajemen Strategik Dan Teknik Penganggaran/Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda, PAU-SE UGM Yogyakarta.

Suralaga, Gde, 2001, “ Peranan Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem”, Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).

Widodo, Hg. Tryanto, 1990, Indikator Ekonomi, Cetakan ke-10, Kanisius, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata



Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.